

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tim Penyusun:

Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
Herman Rois Tata, S.P., M.P.
Muhammad Arif Arbianto, S.P.
Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si.



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2025 dapat selesai tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas serta pertanggungjawaban BRMP Papua Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan perakitan dan diseminasi modernisasi pertanian guna mendukung pembangunan pertanian nasional di wilayah Papua Barat.

BRMP Papua Barat sebagai lembaga penerapan modernisasi pertanian di wilayah Papua Barat dengan sumber daya yang dimiliki, telah melaksanakan beberapa kegiatan penerapan serta diseminasi standar pertanian kepada pengguna maupun stakeholder terkait. Laporan ini menyajikan capaian kinerja BRMP Papua Barat selama Tahun Anggaran 2025.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Manokwari, Januari 2026

Kepala BRMP Papua Barat



Dr. Yong Farmanta, SP., M.Si.

NIP. 197901162003121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Papua Barat dalam mendukung pembangunan pertanian melalui penerapan dan diseminasi modernisasi pertanian spesifik lokasi. Laporan ini juga merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun Anggaran 2025, BRMP Papua Barat melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025–2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Fokus utama pelaksanaan kegiatan diarahkan pada peningkatan penerapan standar dan modernisasi pertanian, penguatan tata kelola birokrasi yang efektif dan berorientasi pelayanan, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Capaian kinerja utama BRMP Papua Barat Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Pada sasaran terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan indikator kinerja Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan. Kegiatan ini mendukung peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha tani dalam menghasilkan produk pertanian yang bermutu dan berdaya saing.

Pada sasaran tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif, kegiatan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dan jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern, belum dapat direalisasikan karena tidak tersedianya anggaran. Kondisi ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, BRMP Papua Barat terus mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pada Tahun 2025, nilai Pembangunan Zona Integritas yang dicapai sebesar 85,64 atau 100,57 % dari target yang ditetapkan. Hasil penilaian mandiri maupun oleh tim BRMP Kementan menunjukkan bahwa BRMP Papua Barat telah memenuhi seluruh persyaratan menuju predikat WBK, bahkan sebagian indikator telah memenuhi kriteria WBBM.

Pada aspek pengelolaan anggaran, kinerja BRMP Papua Barat menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 91,78 atau sebesar 100,33%. Capaian ini mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin akuntabel, efektif, dan

sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 berada pada kategori **berhasil hingga sangat berhasil**. Meskipun masih terdapat kendala, khususnya terkait kebijakan anggaran, BRMP Papua Barat terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan koordinasi untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang. Ke depan, BRMP Papua Barat berkomitmen untuk terus memperluas penerapan modernisasi pertanian, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat tata kelola organisasi guna mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Papua Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	1
1.3. TANTANGAN DAN PERAN STRATEGIS	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. VISI	5
2.2. MISI	5
2.3. TUJUAN	6
2.4. SASARAN	6
2.5. KEGIATAN-KEGIATAN BRMP PAPUA BARAT TAHUN 2025	7
2.5.1. Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025	7
2.5.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
2.5.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA	17
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025	17
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024 -2025.	27
3.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	28
3.2.1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	28
3.2.2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	30
3.2.3. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BPSIP Papua Barat	33
3.2.4. Pengelolaan laboratorium	36
3.2.5. Pengelolaan Kebun Percobaan BRMP Papua Barat.	38
3.2.6. Pelayanan Publik	40
3.2.7. Kegiatan Kerjasama	42
3.3. KEBERHASILAN, KENDALA DAN LANGKAH ANTISIPASI	43
3.3.1. Keberhasilan	43
3.3.2. Kendala	43
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
3.4.1. Realisasi Keuangan	44
3.4.2. Pengelolaan PNB	45
3.4.3. Hibah Langsung Luar Negeri	46
BAB IV PENUTUP	47
4.1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA	47

4.2.	LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA.....	48
LAMPIRAN		49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun Anggaran 2025.....	7
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat (Awal) Tahun 2025	9
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat Revisi I Tahun 2025	10
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat Revisi II Tahun 2025	10
Tabel 5. Rincian Output (RO) Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025	11
Tabel 6. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat (Awal) Tahun 2025.....	12
Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat Revisi I Tahun 2025. ...	12
Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat Revisi II Tahun 2025 ...	13
Tabel 9. Rencana Aksi BRMP Papua Barat Tahun 2025	14
Tabel 10. Revisi Pagu Anggaran BRMP Papua Barat Tahun 2025.....	15
Tabel 11. Pengukuran Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025.	18
Tabel 12. Capaian kinerja Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	19
Tabel 13. Persyaratan Umum Mutu Biji Kopi sesuai SNI 01-2907:2008	20
Tabel 14. Syarat mutu khusus kopi arabika.....	21
Tabel 15. Syarat penggolongan mutu kopi robusta dan arabika	21
Tabel 16. Penentuan Besarnya Nilai Cacat Biji Kopi	21
Tabel 17. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Papua Barat Tahun 2025.....	23
Tabel 18. Hasil penilaian syarat menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan RB no. 90 Tahun 2021.	24
Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Papua Barat.....	26
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan Aspek dan Indikator per Desember 2025	27
Tabel 21. Capaian Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2022-2024.	27
Tabel 22. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian ..	29
Tabel 23. Rincian Target LTT Papua Barat dan Papua Barat Daya	30
Tabel 24. Penanggung Jawab Wilayah Kabupaten/Kota LTT Swasembada Pangan	31
Tabel 25. Total Realisasi LTT Provinsi Papua Barat.....	31
Tabel 26. Total Realisasi LTT Provinsi Papua Barat Daya	32
Tabel 27. Kegiatan dan Output Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Tahun 2025	37
Tabel 28. Nama Kebun Percobaan dan Agro Ekosistem BRMP Papua Barat.	39
Tabel 29. Matrik Pengelolaan KP Anday Tahun 2025	39
Tabel 30. Kegiatan Kebun Percobaan, Komoditas dan Indikator Output.	40
Tabel 31. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik BRMP Papua Barat.....	41

Tabel 32. Kegiatan Kerjasama BRMP Papua Barat Tahun 2025	42
Tabel 33. Pagu Anggaran Kegiatan Utama dan Tingkat Penggunaan Dana Tahun 2025.....	44
Tabel 34. Target PNBP BRMP Papua Barat tahun 2025	45
Tabel 35. Realisasi penerimaan PNBP BRMP Papua Barat tahun 2025 Berdasarkan Akun Penerimaan	46
Tabel 36. Informasi capaian Target, Realisasi Penerimaan, dan Realisasi Pagu Penggunaan PNBP sampai dengan Desember Tahun 2025.	46
Tabel 37. Ringkasan Capaian Kinerja BRMP Papua Barat pada Tahun 2025	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendampingan Kepada Lembaga Penerap Standar Mutu Biji Kopi	22
Gambar 2. Media Cetak Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.....	29
Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan	33
Gambar 4. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium	34
Gambar 5. Pelatihan Implementasi ISO/IEC 17065:2012	34
Gambar 6. Kegiatan Audit Surveilans 1 PT Papua Global Spices (Pala Papua)	35
Gambar 7. Surat Tugas Tim Auditor dan PPC LSPro BSIP Papua Barat.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BRMP Papua Barat Tahun 2025.....	49
Lampiran 2. Jumlah ASN BRMP Papua Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2020-2025.....	50
Lampiran 3. Perkembangan ASN BRMP Papua Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2025.....	51
Lampiran 4. Komposisi ASN BRMP Papua Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	52
Lampiran 5. Perkembangan Jabatan Fungsional BRMP Papua Barat Tahun 2025	53
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja (PK) Awal (BSIP Papua Barat) Tahun 2025..	54
Lampiran 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja (PK Awal) BSIP Papua Barat Tahun 2025	55
Lampiran 8. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi I BRMP Papua Barat Tahun 2025	56
Lampiran 9. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Revisi I Tahun 2025	57
Lampiran 10. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi II BRMP Papua Barat Tahun 2025	58
Lampiran 11. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Revisi II Tahun 2025	59
Lampiran 12. Manual Indikator Kinerja Utama BRMP Papua Barat Tahun 2025	60
Lampiran 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Papua Barat Tahun 2025.	74
Lampiran 14. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan.....	75
Lampiran 15. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BRMP Papua Barat.....	76
Lampiran 16. Keputusan Menteri Hukum RI Pendirian Koperasi Pemasaran AMIN (Anak Muda Inspiratif Negeri)	79
Lampiran 17. SOP Pasca Panen Kopi	80
Lampiran 18. BRMP Penerapan Terbaik I Atas Kinerja Perbenihan Padi Tahun 2024	81
Lampiran 19. Asset BRMP Papua Barat Tahun 2025	82
Lampiran 20. Penghargaan atas kontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan Tahun 2025	83
Lampiran 21. UK/UPT lingkup eselon III Kategori Informatif.....	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sebuah pertanggung jawaban kepada masyarakat (publik) mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilakukan setiap tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 pasal 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010.

Sesuai peraturan penerapan akuntabilitas yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BRMP Kementan diwajibkan untuk: (1) Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. (2) Menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN), baik Bulanan, Triwulan, maupun Tahunan yang dilaporkan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Atas dasar hal-hal diatas, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 yang mencakup target seluruh satker lingkup BRMP Kementan. Salah satu satker terkait adalah BRMP Papua Barat dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam LAKIN BRMP Papua Barat tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dari mandat yang diemban.

1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi

BRMP Papua Barat merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan mandat mendukung pembangunan dan pengembangan pertanian daerah/wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan

Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BRMP Papua Barat memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Susunan organisasi BRMP Papua Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 terdiri atas: (a) Kepala; (b) Sub bagian Tata Usaha; (c) Kelompok Jabatan Fungsional. Namun sesuai dengan kebutuhan kelembagaan internal kelembagaan tersebut dikembangkan dengan menambahkan beberapa struktur yang diperlukan dalam menunjang kinerja Balai. Adapun struktur organisasi BRMP Papua Barat terdiri dari Kepala Balai, Sub bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional (Lampiran 1).

Kepala BRMP Papua Barat adalah jabatan struktural eselon IIIa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IVa. Sub Bagian Tata Usaha membawahi bagian Kepegawaian dan Keuangan, Program, Kebun Percobaan, dan Laboratorium.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga, melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana teknis penerapan dan diseminasi standar pertanian spesifik lokasi.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai Desember 2025, BRMP Papua Barat memiliki 42 ASN yang terdiri dari 26 orang staf Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang staf PPPK dan 8 orang P3K Paruh Waktu. Selain itu, terdapat 5 orang tenaga kontrak yang mendukung operasional kantor dengan tugas pramubakti, dan satpam. Secara umum jumlah ASN di BRMP Papua Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah, yang tahun 2020 sebanyak 36 orang turun 22 orang pada tahun 2024 dan ada tambahan sebanyak 20 orang di tahun 2025. Menurunnya jumlah ASN tersebut disebabkan beberapa pegawai memasuki masa purna bakti, beberapa pegawai mutasi ke satker lain di bawah Kementerian Pertanian, dan sebagian yang lain pindah ke kementerian/lembaga lain karena adanya transformasi kelembagaan.

Berdasarkan golongan, ASN BRMP Papua Barat pada tahun 2025 terdiri atas PNS Golongan II sebanyak 2 orang (4,76 %), Golongan III sebanyak 22 orang (52,39 %), Golongan IV sebanyak 2 orang (4,76 %) dan PPPK Level IX sebanyak 3 orang (7,14%) dan PPPK Level V sebanyak 5 orang (11,90%) (Lampiran 2).

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN BRMP Papua Barat tahun 2025 terbagi ke dalam 5 tingkat, yaitu dimulai dari 1) SLTA sebanyak 14 orang, 2) D3 sebanyak 2 orang, 3) S1 (Sarjana) sebanyak 18 orang, 4) S2 (Magister) sebanyak 7 orang, dan 5) S3 (Doktor) sebanyak 1 orang (lampiran 3).

Sebagai UPT BRMP di daerah, BRMP Papua Barat yang memiliki fungsi di bidang penerapan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, oleh karenanya di dalamnya terdapat ASN dengan fungsional untuk mendukung tugas dan fungsinya. Hingga saat ini BRMP Papua Barat memiliki ASN dengan beberapa jabatan struktural, jabatan fungsional, serta pelaksana yang nama dan kelasnya telah disesuaikan dengan peraturan Kepmentan No. 01/KPTS/KP.010/M/01/2024 tentang Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan jenjang jabatan fungsional, BRMP Papua Barat mempunyai fungsional di bidang pertanian yang terdiri atas Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama, Pengamat Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Analis Standardisasi Ahli Pertama, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Pertama, Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, dan Analis SDMA Ahli Pertama. Sedangkan jabatan fungsional non bidang pertanian terdiri atas Pranata SDM Aparatur Terampil dan Administrasi Perkantoran (Lampiran 4 dan 5).

1.3. Tantangan dan peran strategis

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat menghadapi tantangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam mengawal penerapan inovasi teknologi pertanian modern di tingkat lapangan. Kondisi agroekosistem yang beragam, dampak perubahan iklim, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh petani dan pelaku usaha tani menjadi kendala dalam percepatan modernisasi pertanian. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, ketersediaan data pertanian yang akurat, serta keberlanjutan pendampingan dan diseminasi inovasi juga menjadi tantangan dalam memastikan hasil penerapan teknologi dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

BRMP Papua barat memiliki peran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian di Provinsi Papua Barat dalam penerapan, pengujian, dan diseminasi teknologi pertanian modern dan adaptif spesifik lokasi. Melalui penguatan kegiatan percontohan, pendampingan teknis, dan integrasi teknologi digital pertanian, BRMP Papua Barat berperan mendorong peningkatan efisiensi usaha tani, ketahanan pangan berbasis kawasan, serta pengembangan pertanian berkelanjutan. Selain itu, BRMP Papua Barat berperan memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan mendukung terwujudnya sistem pertanian yang maju, mandiri, dan modern sesuai arah kebijakan pembangunan pertanian nasional tahun 2025–2029.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana operasional Renstra BRMP Papua Barat 2024-2025 merupakan rencana kinerja Balai untuk jangka waktu lima tahunan, yang disusun dan disesuaikan dengan: (i) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (ii) Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, (iii) Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029, (iv) Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2024-2025, (v) RPJMD Papua Barat 2013-2027, serta (vi) isu strategis pembangunan pertanian di wilayah Papua Barat.

Kementerian pertanian menetapkan target swasembada 2015-2045 dengan program Pertanian Bioindustri Berkelanjutan. Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Pertanian (Kementan) periode 2025–2029 difokuskan pada terwujudnya kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan hilirisasi produk pertanian. Oleh karena itu, pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional. Dalam upaya mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian, BRMP Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan acuan bagi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) yang berada di bawahnya.

Renstra BRMP dan BBPPMP (Balai Besar Penerapan dan Pengembangan Modernisasi Pertanian) yang memuat visi, misi, tujuan BRMP Papua Barat telah menyusun Renstra 2024-2025 dengan mengacu pada, sasaran strategis, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan BRMP Papua Barat. Renstra selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam Tahun 2025 BRMP Papua Barat menyusun RKT untuk dapat memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan secara jelas, terarah dan terukur dan bisa menjadi acuan evaluasi kinerja BRMP Papua Barat (tabel 1).

2.1. Visi

Visi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat mengacu kepada visi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Visi Kementerian Pertanian, yaitu *"Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan"*.

2.2. Misi

Misi BRMP Papua Barat selaras dengan misi BRMP, mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu:

- a. Melaksanakan perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;

- b. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
- c. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi;
- d. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
- e. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

2.3. Tujuan

Tujuan BRMP Papua Barat tahun 2025 – 2029 yaitu :

- a. Terlaksananya perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional ;
- b. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern ;
- c. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi
- d. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani ;
- e. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

2.4. Sasaran

Adapun Sasaran Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan indikator kinerja: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah);

- b. Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif, dengan indikator kinerja: 1) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi), 2) Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit);
- c. Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, dengan indikator kinerja Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah);
- d. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai);
- e. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai).

2.5. Kegiatan-Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025

2.5.1. Kebijakan, Program dan Kegiatan-kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025

Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025 dalam mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun Anggaran 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO /KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	JUMLAH BIAYA
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		64.238.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian		64.238.000
7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	161 Orang	64.238.000
051	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian		64.238.000
<i>A</i>	<i>Diseminasi Standar Instrumen Pertanian</i>		<i>64.238.000</i>
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen		5.839.783.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas dan Modernisasi Pertanian		5.839.783.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO /KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	JUMLAH BIAYA
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan	1.175.000.000
051	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan	1.175.000.000
<i>A</i>	<i>Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian</i>		<i>1.175.000.000</i>
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.643.131.000
6918.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	10.000.000
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN		10.000.000
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Pengelolaan BMN</i>		<i>10.000.000</i>
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	23.702.000
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	23.702.000
<i>A</i>	<i>Pengelolaan Informasi Publik</i>	1 Layanan	<i>23.702.000</i>
6918.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	149.646.000
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	1 Layanan	149.646.000
<i>A</i>	<i>Penyusunan Program dan Anggaran</i>		<i>15.272.000</i>
<i>E</i>	<i>Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil</i>		<i>24.737.000</i>
<i>F</i>	<i>Layanan Kepegawaian</i>		<i>24.602.000</i>
<i>G</i>	<i>Layanan Keuangan</i>		<i>16.425.000</i>
<i>H</i>	<i>Layanan Ketatausahaan Rumah Tangga Kearsipan dan Perlengkapan</i>		<i>26.105.000</i>
<i>I</i>	<i>Sinkronisasi Kegiatan</i>		<i>42.505.000</i>
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.324.783.000
001	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	2.009.259.000
<i>A</i>	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>		<i>2.009.259.000</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	2.450.524.000
<i>A</i>	<i>Operasional perkantoran</i>		<i>1.355.696.000</i>

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO /KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	JUMLAH BIAYA
B	Pemeliharaan perkantoran		1.040.092.000
C	Pengelolaan Laboratorium		20.736.000
D	Pengelolaan Kebun Percobaan		34.000.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	21.652.000
051	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	21.652.000
A	Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi		5.240.000
B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks		16.412.000

2.5.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat (Awal) Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) 2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)

Pada tabel 2 di atas adalah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat masih dalam proses transformasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat Revisi I Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan Standar Pertanian.	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan Standar Pertanian (Jumlah Usahatani)
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)

Pada tabel 3 di atas adalah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi Pertama yang masih mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja dari BRMP Papua Barat pada tahun 2024-2025.

Untuk selanjutnya Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Revisi Kedua yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel 4.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat Revisi II Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
		Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Revisi II ini sekaligus sebagai Sasaran dan Indikator Kinerja terakhir dan tidak mengalami perubahan terhadap sasaran kinerja yang akan dicapai.

Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja BRMP Papua Barat Revisi II Tahun 2025 tersebut, maka Indikator Kinerja Utama BRMP Tahun 2025 diuraikan ke dalam beberapa Kerangka Rincian Output (KRO) yaitu : (1) Standarisasi Produk dan (2) Layanan Dukungan Manajemen Internal. Sedangkan Rincian Output (RO) kegiatan yaitu : (1) Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (161 orang); (2) Layanan BMN (1 Layanan); (3) Layanan Umum (1 Layanan); dan (4) Layanan Perkantoran (1 Layanan) (Tabel 5).

Tabel 5. Rincian Output (RO) Kegiatan BRMP Papua Barat Tahun 2025

No.	Rincian Outout (RO)	Target
1	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	161 Orang
2	Koordinasi Pendampingan Program Strategis kementerian Pertanian	1 Kegiatan
3	Layanan BMN	1 Layanan
4	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
5	Layanan Umum	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	1 Layanan
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen

2.5.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, BRMP Papua Barat telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BRMP Papua Barat dengan Kepala BRMP Kementan. Pada PK Pertama

terdapat 4 sasaran yang ingin dicapai disertai indikator kinerjanya (Tabel 6).

Tabel 6. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat (Awal) Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produk instrumen pertanian (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)	85

Pada tabel 6 di atas adalah Perjanjian Kinerja Pertama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat masih dalam proses transformasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat Revisi I Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan Standar Pertanian.	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan Standar Pertanian (Jumlah Usahatani)	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	85

Pada tabel 7 di atas adalah Perjanjian Kinerja (PK) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun 2025 yang mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja dari BRMP Papua Barat pada tahun 2024-2025.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat Revisi II Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-
		Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)	-
LAINNYA			
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	85.15
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	91.48

Perjanjian Kinerja Revisi II ini sekaligus sebagai Perjanjian Kinerja terakhir dan tidak mengalami perubahan terhadap sasaran kinerja yang akan dicapai di Tahun 2025. PK BRMP Papua Barat mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali karena perubahan pagu dan target kinerja serta kebijakan dari Kementerian Pertanian.

Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Papua Barat sebagai instansi eselon-III lingkup BRMP Kementan diuraikan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi BRMP Papua Barat tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Rencana Aksi BRMP Papua Barat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Uraian Sub Komponen	Anggaran
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1 Lembaga	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	64.238.000
Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	-	-
Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-	-	-
Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)	-	-	-
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85.15 Nilai	Pendampingan Program Strategis Kementerian pertanian	1.175.000.000
		Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10.000.000
		Pengelolaan Informasi Publik	23.702.000
		Penyusunan Program dan Anggaran	15.272.000
		Layanan penerapan SIP dan pengelolaan produk hasil	24.737.000
		Layanan kepegawaian	24.602.000
		Layanan Kerumah tanggaan dan umum	26.105.000
		Layanan keuangan	16.425.000
		Layanan ketatausahaan, rumah tangga tangga, kearsipan dan perlengkapan Sinkronisasi kegiatan	26.105.000
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	85.48 Nilai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	42.505.000
			2.009.259.000

Indikator Kinerja	Target	Uraian Sub Komponen	Anggaran
(IKPA) Balai Penerapan modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)		Operasional Perkantoran	1.355.696.000
		Pemeliharaan Perkantoran	1.040.092.000
		Pengelolaan Laboratorium	20.736.000
		Pengelolaan Kebun Percobaan	34.000.000
		Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	16.412.000

Pencapaian target indikator PK melalui beberapa kegiatan yang dituangkan dalam sub komponen dari komponen utama dan pendukung. Komponen utama dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 64.238.000,- terdiri dari 1 (satu) sub komponen yaitu 1) Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, 2) Komponen Pendukung dengan anggaran sebesar Rp. 5,848,783,000 ,- dengan total pagu Rp. 5,913,021,000,-. Sedangkan PAGU Efektif Tahun 2025 adalah Rp. 5.501.698.000,- dan Blokir anggaran sebesar Rp. 411.323.000,- pada DIPA revisi keempat belas yang merupakan revisi terakhir. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi disajikan pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Revisi Pagu Anggaran BRMP Papua Barat Tahun 2025

No	Kondisi Revisi Anggaran	PAGU Anggaran (Rp)	Tanggal DIPA
1	Dipa Awal Tahun 2025	4.370.107.000	02 Des 2024
2	Revisi 01: Pemutakhiran hlmn III Dipa	4.370.107.000	12 Feb 2025
3	Revisi 02: Efisiensi belanja APBN	4.370.107.000	20 Febi 2025
4	Revisi 03: Buka Blokir 002, Penambahan Pagu dan Blokir Keg Pendampingan	5.470.107.000	25 Mar 2025
5	Revisi 04: Revisi Halaman III DIPA TW 2	5.470.107.000	17 April 2025
6	Revisi 05: Pendampingan dan buka blokir dukman	5.470.107.000	30 April 2025
7	Revisi 06: Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai PNS ke PPPK 4+1	5.470.107.000	20 Mei 2025
8	Revisi 07: Revisi Halaman III DIPA TW 3	5.470.107.000	10 Juli 2025
9	Revisi 08: Buka Blokir Penyesuaian RO dan Penambahan Belanja Pegawai	5.648.307.000	02 Sept 2025
10	Revisi 09: Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNB	5.694.021.000	19 Sept 2025
11	Revisi 10: Pergeseran Antar Subkomponen 002	5.694.021.000	26 Sept 2025
12	Revisi 11:	5.904.021.000	11 Oktr 2025

	Revisi Realokasi Perjadin Swasembada dan Pemeliharaan		
13	Revisi 12: Revisi Hal III DIPA TW 4	5.904.021.000	15 Okt 2025
14	Revisi 13: Revisi Belanja Pegawai Tahap II 2025	5.913.021.000	19 Nov 2025
15	Revisi 14: Revisi Pemutakhiran KPA 001 002 dan Pendampingan	5.913.021.000	06 Des 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BRMP Papua Barat diawali dengan perencanaan, yaitu menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses yang menghasilkan suatu modernisasi pertanian spesifik lokasi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Indikator kinerja yang dilakukan BRMP Papua Barat adalah berdasarkan indikator output. Dalam mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2025 tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025, capaian kinerja terdiri atas sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target, disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Pengukuran Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Kinerja (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga	1.00	1.00	100 %
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif.	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi	-	-	-
		Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Unit	-	-	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)	Orang	-	-	-
LAINNYA						
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	Nilai	85.15	85.64	100.57
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	Nilai	91.48	91.78	100.33

Indikator kinerja jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan sesuai target adalah 1 (satu) lembaga dengan capaian sesuai target 100%. Sedangkan Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dengan capaian nilai 85,64 atau sebesar 100,57%, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian nilai 91,78 atau sebesar 100,33%. Sementara untuk indikator kinerja Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi), Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit), Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah) tidak terdapat target, dikarenakan tidak tersedia anggaran di Tahun 2025.

Sasaran I : Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani.

Sasaran Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani : Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah).

Indikator Kinerja 1 : Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)

Indikator kinerja pertama adalah Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah) tercapai 100 % dengan kategori berhasil dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Capaian kinerja Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	1	100

Sasaran Kinerja Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dilakukan melalui kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian, yaitu diseminasi Standar Mutu Biji Kopi (SNI 01-2907:2008) dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator kinerja ini tercapai melalui beberapa kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan.

SNI yang ditargetkan untuk didiseminasikan oleh BRMP Papua Barat tahun 2025 kepada lembaga penerap yaitu SNI mutu biji kopi (SNI 01-2907:2008). Lembaga penerap yang mendapatkan pendampingan adalah Koperasi AMIN (Anak Muda Inspiratif Negeri) di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor agribisnis yang

memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Permintaan akan kopi berkualitas terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri kopi spesialti dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap cita rasa serta standar mutu produk. Untuk memenuhi ekspektasi pasar dan meningkatkan daya saing, penerapan standar mutu kopi menjadi suatu keharusan bagi para pelaku industri, mulai dari petani, pengolah, hingga eksportir.

Standar mutu kopi mencakup berbagai aspek, mulai dari budidaya, panen, pascapanen, hingga proses pengolahan dan penyimpanan. Faktor-faktor seperti pemilihan varietas unggul, teknik budidaya berkelanjutan, pemanenan selektif, serta metode pengolahan yang tepat sangat mempengaruhi kualitas akhir kopi. Selain itu, standar mutu juga bertujuan untuk memastikan keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan petani melalui penerapan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan sistem sertifikasi seperti Organik, Fair Trade, Rainforest Alliance, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kopi.

Di Indonesia, penerapan standar mutu kopi menjadi semakin penting mengingat posisi negara ini sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Namun, masih terdapat tantangan dalam konsistensi mutu, keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan, serta kurangnya pemahaman petani terhadap standar yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penelitian, asosiasi kopi, serta pelaku usaha untuk meningkatkan penerapan standar mutu guna mendukung pertumbuhan industri kopi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global.

Dengan adanya penerapan standar mutu yang baik, diharapkan kopi Indonesia dapat terus berkembang dan dikenal sebagai produk berkualitas tinggi, meningkatkan nilai tambah bagi petani, serta memperkuat posisinya di pasar internasional.

Tabel 13. Persyaratan Umum Mutu Biji Kopi sesuai SNI 01-2907:2008

No	Kriteria	Satuan	Persyaratan
1	Serangga hidup		Tidak ada
2	Biji berbau busuk dan atau berbau kapang		Tidak ada
3	Kadar air	% fraksi massa	Maks. 12,5
4	Kadar kotoran	% fraksi massa	Maks. 0,5

Tabel 14. Syarat mutu khusus kopi arabika

Ukuran	Kriteria	Satuan	Persyaratan
Besar	Tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm (<i>Sieve</i> No. 16)	% fraksi massa	Maks lolos 5
Sedang	Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 6 mm (<i>Sieve</i> No. 15)	% fraksi massa	Maks lolos 5
Kecil	Lolos ayakan diameter 6 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 5 mm (<i>Sieve</i> No. 13)	% fraksi massa	Maks lolos 5

Tabel 15. Syarat penggolongan mutu kopi robusta dan arabika

Mutu	Persyaratan
Mutu 1	Jumlah nilai cacat maksimum 11*
Mutu 2	Jumlah nilai cacat 12 sampai dengan 25
Mutu 3	Jumlah nilai cacat 26 sampai dengan 44
Mutu 4a	Jumlah nilai cacat 45 sampai dengan 60
Mutu 4b	Jumlah nilai cacat 61 sampai dengan 80
Mutu 5	Jumlah nilai cacat 81 sampai dengan 150
Mutu 6	Jumlah nilai cacat 151 sampai dengan 225
CATATAN Untuk kopi arabika mutu 4 tidak dibagi menjadi sub mutu 4a dan 4b Penentuan besarnya nilai cacat dari setiap biji cacat dicantumkan dalam Tabel 7. * untuk kopi peaberry dan polyembrio	

Tabel 16. Penentuan Besarnya Nilai Cacat Biji Kopi

No	Jenis cacat	Nilai cacat
1	1 (satu) biji hitam	1 (satu)
2	1 (satu) biji hitam sebagian	½ (setengah)
3	1 (satu) biji hitam pecah	½ (setengah)
4	1 (satu) kopi gelondong	1 (satu)
5	1 (satu) biji coklat	¼ (seperempat)
6	1 (satu) kulit kopi ukuran besar	1 (satu)
7	1 (satu) kulit kopi ukuran sedang	½ (setengah)
8	1 (satu) kulit kopi ukuran kecil	1/5 (seperlima)
9	1 (satu) biji berkulit tanduk	½ (setengah)
10	1 (satu) kulit tanduk ukuran besar	½ (setengah)
11	1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang	1/5 (seperlima)
12	1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil	1/10 (sepersepuluh)
13	1 (satu) biji pecah	1/5 (seperlima)
14	1 (satu) biji muda	1/5 (seperlima)
15	1 (satu) biji berlubang satu	1/10 (sepersepuluh)
16	1 (satu) biji berlubang lebih dari satu	1/5 (seperlima)
17	1 (satu) biji bertutul-tutul	1/10 (sepersepuluh)
18	1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran besar	5 (lima)
19	1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran sedang	2 (dua)
20	1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran kecil	1 (satu)
KETERANGAN Jumlah nilai cacat dihitung dari contoh uji seberat 300 g. Jika satu biji kopi mempunyai lebih dari satu nilai cacat, maka penentuan nilai cacat tersebut didasarkan pada bobot nilai cacat terbesar.		



Gambar 1. Pendampingan Kepada Lembaga Penerap Standar Mutu Biji Kopi

Sasaran 2 : Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif.

Sasaran tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif dengan indikator kinerja: 1) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif, 2) Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit) tidak terdapat target dikarenakan tidak tersedia anggaran di tahun 2025.

Sasaran 3 : Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani.

Sasaran terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani dengan indikator kinerja: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah) tidak terdapat target dikarenakan tidak tersedia anggaran di tahun 2025.

Sasaran 4 : Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima terdiri dari indikator kinerja dengan indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

Indikator Kinerja 4 : Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar instrumen Pertanian Papua Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pada Tahun 2025 nilai Pembangunan Zona Integritas adalah 85,64 yang diperoleh dari penilaian mandiri tim pembangunan zona integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dan Tim BRMP Kementan. Penilaian dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. Penilaian dilakukan di berbagai area, yaitu: 1) Area Manajemen Perubahan, 2) Area Penataan Tata Laksana, 3) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4) Area Penguatan Akuntabilitas, 5) Area Penguatan Pengawasam dan 6) Area Peningkatan Pelayanan Publik.

Penilaian mandiri yang dilakukan juga berdasarkan pada komponen pengungkit dan hasil. Kategori pengungkit terdiri dari pemenuhan dokumen dan reform (evidence dari implementasi pemenuhan dokumen yang telah disusun). Sedangkan untuk komponen hasil terdiri dari: 1) terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel berdasarkan hasil nilai survey eksternal mengenai persepsi korupsi dan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, 2) terwujudnya pelayanan publik yang prima berdasarkan nilai survey eksternal mengenai persepsi kualitas pelayanan.

Kinerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM BRMP Papua Barat pada Tahun 2025 telah terlaksana di seluruh area output hasil penilaian mandiri lingkup BRMP Kementerian Pertanian dengan tingkat perolehan nilai 85,64 atau 100,57 % terhadap rencana target nilai 85,15. Hasil penilaian tersebut ditetapkan dalam SK Kabadan BRMP Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tanggal 18 Desember 2025. Nilai capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM BRMP Papua Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Papua Barat Tahun 2025.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Standar instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)	85.15	85.64	100.57

Sesuai Perjanjian Kerja tahun 2025, target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat sebesar 85.15 (Nilai) dan tercapai 85.64 (Nilai). Nilai capaian ini diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan secara mandiri maupun oleh Tim Penilai BRMP Kementan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) terhadap pemenuhan syarat penetapan instasi menuju WWBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Hasil penilaian syarat menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan RB no. 90 Tahun 2021.

Syarat menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan RB no. 90 Tahun 2021			Hasil Penilaian TPI	Keterangan
SYARAT	MENUJU WBK	MENUJU WBBM		
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK	85,15	Terpenuhi kategori WBBM
Nilai minimal pengungkit	40	48	50,76	Terpenuhi kategori WBBM

Syarat menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan RB no. 90 Tahun 2021			Hasil Penilaian TPI	Keterangan
SYARAT	MENUJU WBK	MENUJU WBBM		
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%	84,60%	Terpenuhi kategori WBBM
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25	19,50	18,69	Terpenuhi kategori WBK
Nilai sub-komponen "Survey persepsi anti korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)	16,19 (survey 3,70)	Terpenuhi kategori WBBM
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75	2,50	Terpenuhi kategori WBK
Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)	15,71 (survey 3,59)	Terpenuhi kategori WBK

Berdasarkan Tabel 18, terdapat beberapa syarat minimal yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). BRMP Papua Barat telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan kategori WBK pada penilaian mandiri lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tahun 2025. Bahkan pada poin-poin tertentu yakni, 1) nilai total, 2) nilai minimal pengungkit, 3) Bobot nilai minimal per area pengungkit, 4) Nilai sub-komponen "Survey persepsi anti korupsi" minimal sudah memenuhi syarat untuk memperoleh predikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area perubahan berdasarkan tim kerja pembangunan Zona Integritas.

Sasaran 5 : Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas terdiri dari indikator kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Papua Barat (Nilai) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat. Capaian kinerja sasaran 4, diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (berdasarkan regulasi yang berlaku) (nilai).

Indikator Kinerja 5 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran NKA diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan dan Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran IKPA. IKPA merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran yang diukur berdasarkan regulasi sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai IKPA merupakan penjumlahan pembobotan masing-masing indikator (1) revisi DIPA, (2) deviasi halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) belanja kontraktual, (5) penyelesaian tagihan, (6) pengelolaan UP dan TUP, dan (7) capaian output, dikurangi dengan indikator dispensasi SPM.

Nilai IKPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat ditetapkan target sebesar 91,48. Nilai tersebut merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai IKPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun 2025 (berdasarkan regulasi yang berlaku) diperoleh dari aplikasi OM SPAN sebesar 91,78 atau mencapai 100,32 % dari nilai target IKPA 91,48 (Tabel 19).

Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Papua Barat.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Papua Barat (Nilai)	91,48	91,78	100,33

Pada tabel di atas indikator IKPA yang terealisasi 91,78 dengan persentasi 100,33 (%). Nilai IKPA dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu sangat baik

apabila nilai IKPA ≥ 95 , baik bila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 , cukup apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 , dan kurang apabila nilai IKPA < 70 . Berdasarkan kategori tersebut, capaian kinerja IKPA BRMP Papua Barat mencapai 91,78 dan tergolong kategori baik.

Tabel 20. Capain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan Aspek dan Indikator per Desember 2025

No	Indikator	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
A	Kualitas Perencanaan Anggaran			
	1 Revisi Dipa	100	10	10.00
	2. Deviasi Halaman III DIPA	82.61	15	12.39
B	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
	1 Penyerapan Anggaran	98.38	20	19.68
	2 Belanja Kontraktual	50	10	5.00
	3 Penyelesaian Tagihan	100	10	10.00
	4 Pengelolaan UP dan TUP	97.17	10	9.72
C	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
	1. Capaian Output	100	25	25.00
Nilai Total				91,78
Dispensasi SPM (Pengurang)				0
Nilai Akhir				91,78

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024 -2025.

BRMP Papua Barat baru terbentuk pada awal tahun 2025, sebagai unit pelaksana teknis dibawah BRMP Kementerian Pertanian. Sesuai Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka BRMP Papua Barat memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berbeda antar tahun. Perbandingan capaian kinerja BRMP Papua Barat tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2022-2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	-	1	1	2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-	1	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	-	15.000 (pohon)	29 (ton)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	79,98	84,12	85,15	85,64
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	86,79 (NKA)	90,23 (NKA)	96,80 (IKPA)	91,78 (IKPA)

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Penerapan SNI merupakan kunci dalam peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing hasil pertanian. Dengan komitmen bersama, penerapan standar ini mampu menghadirkan kesejahteraan bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. SNI yang didiseminasikan oleh BRMP

Papua Barat tahun 2025, yaitu: 1) SNI 01-2907-2008 tentang Mutu Biji Kopi dan 2) SNI 6233:2015 tentang Produksi Benih Padi Inhibrida. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan penganggaran di DIPA 2025. Metode diseminasi yang digunakan yaitu melalui penyuluhan, diskusi langsung, dan materi yang dikemas dalam bentuk media cetak brosur. Kegiatan diseminasi dilakukan di kelompok tani (KT)/pelaku usaha di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (Tabel 22).

Tabel 22. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

No	Materi	Tempat	Lempaga/ Kelompok Tani	Jumlah (Orang)
1	SNI 01-2907-2008; Mutu Biji Kopi dan Peraturan Menteri Pertanian RI No 52 / Permentan /OT.140/9/2012	Distrik Sururey, Kab. Pegunungan Arfak.	Koperasi AMIN	26
2	SNI 6233:2015 tentang Produksi Benih Padi Inbrida	Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari.	Kelompok Tani Bebeas Tunta	29
3	SNI 6233:2015 tentang Produksi Benih Padi Inbrida	Distrik Warmare, Kab. Manokwari.	Kelompok Tani Tuaisi	29
4	SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida	Distrik Oransbari, Kab. Manokwari Selatan.	Kelompok Tani Karya Bakti	57
5	SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida	Distrik Mariat. Kab. Sorong.	Kelompok Tani Sido Dadi	20
Jumlah				161

Berdasarkan tabel di atas jumlah penerima diseminasi standar instrumen pertanian totalnya 161 orang dengan rincian penerima diseminasi SNI SNI 01-2907-2008: Mutu Biji kopi sebanyak 26 orang dan penerima diseminasi SNI 6233:2015: Produksi Benih Padi Inbrida sebanyak 135 orang.



Gambar 2. Media Cetak Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

3.2.2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kts/PW.020/M/03/2025 junto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/KPTS./PW.020/M/06/2025 memberikan tugas kepada kepala UPTP untuk terlibat dalam Tim Penanggung Jawab (PJ) satuan tugas swasembada pangan untuk mendampingi dan mengawal realisasi LTT di masing-masing Provinsi.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dengan UPT di level Provinsi memiliki peran yang strategis untuk mendorong dan mengawal pelaksanaan program swasembada pangan di lapangan melalui pendekatan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait di daerah. BRMP Papua Barat di tahun 2025 mendampingi dan mengawal program swa sembada pangan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Rincian target luas tambah tanam (LTT) pada program swasembada pangan untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel 23 berikut:

Tabel 23. Rincian Target LTT Papua Barat dan Papua Barat Daya

No	Kabupaten/Provinsi	Target LTT 2025 (Ha)		
		reguler	gogo	total
	Papua Barat	3.704	1.505	5.209
1	Manokwari	2.172	1.300	3.472
2	Manokwari Selatan	1.411	10	1.421
3	Teluk Bintuni	63	-	63
4	Teluk Wondama	14	45	59
5	Fakfak	44	150	194
6	Kaimana	-	-	-
7	Pegunungan Arfak	-	-	-
	Papua Barat Daya	268	317	585
1	Sorong	76	67	143
2	Sorong Selatan	1	250	251
3	Raja Ampat	175	-	175
4	Tambraw	16	-	16
5	Maybrat	-	-	-
6	Kota Sorong	-	-	-

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 458 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian nomor 109 tentang penanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan swasembada pangan, diketahui bahwa penanggung jawab provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah Kepala Balai Penerapan Modernisasi

Pertanian Papua Barat. Sedangkan penanggungjawab di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Penanggung Jawab Wilayah Kabupaten/Kota LTT Swasembada Pangan

No.	Kab/Kota	Penanggung Jawab	Target LTT Reguler	Target LTT gogo
Papua Barat				
1.	Fakfak	Arya Bima Senna	44	150
2.	Kaimana	Sostenes Konyep	-	-
3.	Teluk Wondama	Sostenes Konyep	14	45
4.	Teluk Bintuni	Herman Rois Tata	63	-
5.	Manokwari	Muh. Fathul Ulum A.	2.172	1.300
6.	Manokwari Selatan	Arya Bima Senna	1.411	10
7.	Pegunungan Arfak	Herman Rois Tata	-	-
Papua Barat Daya				
1.	Raja Ampat	Mergono	175	-
2.	Sorong	Galih Wahyu Hidayat	76	67
3.	Maybrat	Mergono	-	-
4.	Tambraw	Galih Wahyu Hidayat	16	-
5.	Sorong Selatan	Mergono	1	250
6.	Kota Sorong	Galih Wahyu Hidayat	-	-

Pelaksanaan kegiatan pendampingan LTT Reguler dan Gogo Di Provinsi Papua Barat hingga bulan Desember tahun 2025 telah tertanam seluas 4.540,99 ha atau 87,18% dari total target LTT di Papua Barat. Rincian capaian realisasi tersebut terdiri dari 4.083,76 Ha atau 110,25% adalah realisasi LTT Reguler dan 457,23 Ha atau 30,38% adalah realisasi LTT Gogo. Total realisasi padi reguler dan gogo untuk Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 4. Di Provinsi Papua Barat terdapat dua Kabupaten yang tidak termasuk dalam target LTT yaitu Kab. Kaimana dan Kab. Pegunungan Arfak. Namun demikian, Kab. Kaimana menjadi salah satu penyumbang realisasi LTT di Provinsi Papua Barat.

Tabel 25. Total Realisasi LTT Provinsi Papua Barat

No	Kabupaten	Target 2025			REALISASI TOTAL TAHUN 2025			
		Reg	Gogo	Total	Reg	Gogo	LTT	%
1	Manokwari	2.172	1.300	3.472	2.612,66	363,73	2.976,39	85,73
2	Manokwari Selatan	1411	10	1421	1256,00	28,00	1284,00	90,36
3	Teluk Bintuni	63	-	63	167,75	6,00	173,75	275,79
4	Teluk Wondama	14	45	59	14,10	34,00	48,10	81,53
5	Fakfak	44	150	194	33,25	5,00	38,25	19,72
6	Kaimana	-	-	-	-	20,50	20,50	
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	
Total					4.083,76	457,23	4.540,99	
Persentase (%)							-	87,18

Daerah penyumbang terbesar Luas Tambah Tanam (LTT) padi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan. Kedua kabupaten ini merupakan lumbung padi untuk wilayah Papua Barat. Selain itu, lahan sawah yang dimiliki umumnya berada pada satu kawasan hamparan yang luas sehingga koordinasi dan pengawasannya mudah dilakukan.

Tabel 26. Total Realisasi LTT Provinsi Papua Barat Daya

No	Kabupaten	Target 2025			REALISASI TOTAL			
		Reg	Gogo	Total	Reg	Gogo	LTT	%
1	Sorong	76	67	143	85,90	75,75	161,65	113,04
2	Sorong Selatan	1	250	251	1,00	26,50	27,50	10,96
3	Raja Ampat	175	-	175	192,76	1,00	193,76	110,72
4	Tambraw	16	-	16	26,00	32,00	58,00	362,50
5	Maybrat	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-
Total (Ha)					305,66	135,25	440,91	
Persentase (%)								75,37

Prestasi realisasi LTT Provinsi Papua Barat Daya tidak sebaik jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Daerah dengan penyumbang tealisasi LTT terbesar adalah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Kedua kabupaten tersebut memiliki luas baku sawah yang cukup luas jika dibanding dengan kabupaten lainnya. Selain itu, masih terdapatnya lokasi transmigrasi menyebabkan budaya bertani masih terjaga. Sedangkan untuk Kabupaten Tambraw, menjadi daerah dengan prestasi realisasi LTT terbesar di Papua Barat Daya. Realisasi LTT di Kabupaten Tambraw tertinggi berasal dari penanaman padi gogo yang masih umum dilakukan secara mandiri di wilayah tersebut. Sedangkan untuk wilayah dengan prestasi terkecil di Papua Barat Daya adalah Kabupaten Sorong Selatan. Kecilnya realisasi di Sorong Selatan disebabkan lahan pertanian yang diusahakan oleh petani eksisting sangat kecil dan tidak sesuai dengan perkiraan. Disamping itu, target padi gogo yang ditetapkan oleh Kementan ternyata terlalu tinggi bila dibandingkan dengan lahan yang ada di lapangan.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan

3.2.3. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BPSIP Papua Barat

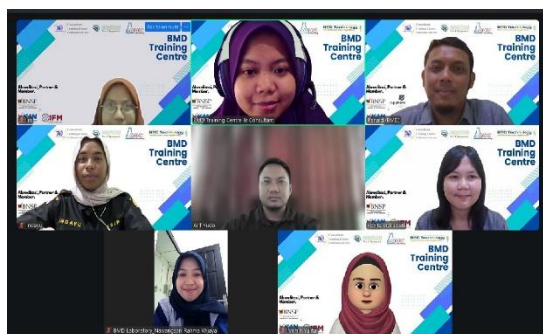
Pada tahun 2023, BRMP Papua Barat telah mulai proses pembentukan Lembaga sertifikasi produk LSPro BRMP Papua Barat. Hingga pada tahun 2024 lembaga tersebut telah mendapatkan sertifikat akreditasi LSPro oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSPr-135-IDN. Saat ini LSPro BRMP Papua Barat sedang menjalankan strategi untuk memelihara dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan persyaratan KAN. Beberapa strategi untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi LSPro diantaranya adalah dengan 1) mengembangkan pelatihan personel untuk menjaga, meningkatkan dan memperbaharui keahlian personel pada bidang tertentu; 2) Melakukan audit survailen kepada klien lama untuk memelihara SPPT-SNI klien.

Kedua proses pemeliharaan tersebut perlu dilakukan mengingat organisasi BRMP Papua Barat selama ini telah rutin melakukan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pertanian. Selain itu, terdapat perjanjian antara pihak LSPro BRMP Papua Barat dengan klien yang berbunyi bahwa biaya yang keluar selama satu siklus sertifikat kesesuaian mereka, akan ditanggung oleh BRMP Papua Barat, termasuk audit survailen. Langkah ini diambil adalah untuk menarik minat awal kepada LSPro yang baru akan dibentuk pada saat itu.

Melalui dana kemitraan Tahun 2025, LSPro BRMP Papua Barat melaksanakan a) Peningkatan Kompetensi berupa Pelatihan Personel LSPro BPSIP Papua Barat, dan b) Audit Surveilans Klien LSPro BPSIP Papua Barat.

Pelatihan Personel LSPro BPSIP Papua Barat

Perubahan struktur organisasi dan personel yang dinamis pada lingkup BRMP Kementerian Pertanian, sedikit banyak berpengaruh kepada struktur organisasi dan personel BRMP Papua Barat. Perubahan yang terjadi pada BRMP Papua Barat di tahun 2025 adalah terjadinya rotasi dan penggantian posisi Kepala BRMP Papua Barat dan penambahan personel organisasi dari pengadaan CPNS maupun PPPK. Dengan terjadinya perubahan personel dan struktur organisasi maka dibutuhkan pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, dan 2) Pelatihan Implementasi ISO/IEC 17065:2012.



Gambar 4. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium



Gambar 5. Pelatihan Implementasi ISO/IEC 17065:2012

Audit Survailen Klien LSPro BPSIP Papua Barat

LSPro BRMP Papua Barat sebagai lembaga penilai kesesuaian produk memiliki fungsi dalam menilai dan menjaga kesesuaian kualitas produk klien terhadap standar yang ditentukan. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah kegiatan survailen. Kegiatan survailen ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin konsistensi klien dalam menjalankan proses produksi hingga menghasilkan produk agar selalu sesuai dengan standar produk yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah SNI (Standar Nasional Indonesia).

Sesuai dengan jadwal yang ada berdasarkan klien LSPro BRMP Papua Barat, pada tahun 2025 terdapat dua klien yang harus dilakukan survailen, salah satunya adalah PT. Papua Global Spices (PGS) yang dijadwalkan dilakukan survailen pada bulan November 2025. Survailen pada PT. PGS dilakukan berdasarkan ruang lingkup LSPro BRMP Papua Barat untuk SNI 6:2021 tentang Pala. Skema sertifikasi untuk ruang lingkup Pala mengacu pada Lampiran XIV PBSN 4 Tahun 2024 dan penilaian proses produksinya mengacu pada Perdirjen Agro No. 30 Tahun 2011.



Gambar 6. Kegiatan Audit Survailen 1 PT Papua Global Spices (Pala Papua)

	FORM		No. Dokumen	F 7.9.2
	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BPMP PAPUA BARAT		Edisi/Revisi	1/1
			Tanggal Validasi	
			Halaman	1 dari 1
SURAT TUGAS				
Nomor: 15/LSPR-PB/10/2025				
Dasar:	1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor: B-427/KPTS/PP.140/H.12.31/08/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Nomor B-519.1/KPTS/PP.140/H.12.31/11/2023 Penetapan Struktur Organisasi dan Susunan Personel Pada Lembaga Sertifikasi Produk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat 2. Surat Perjanjian Kontrak Sertifikasi dengan CV. Papua Global Spices Nomor: 04/LSPR-PB/06/2024 tanggal 17 Juni 2024			
Memerintahkan:				
Kepada / sebagai :	1. Subiadi, S.P., M.Sc / Lead Auditor 2. Muh. Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si / Auditor Magang 3. M. Arif Arbianto, S.P / Petugas Pengambil Contoh 4. Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc / Petugas Pengambil Contoh			
Untuk:	Melaksanakan kegiatan audit dan pengambilan sampel			
☐ Sertifikasi (Awal/Lanjutan) ☒ Surveilans (Kesatu/Kedua) ☐ Lainnya				
Pada perusahaan:	CV. Papua Global Spices			
Alamat:	Jl. Imam Bonjol, RT 007 RW 000, Wagom, Fakfak - Provinsi Papua Barat			
Penerapan SNI:	SNI 0006:2021 Pala			
Terhitung mulai tanggal:	31 Oktober s.d 01 November 2025			

Gambar 7. Surat Tugas Tim Auditor dan PPC LSPro BSIP Papua Barat

3.2.4. Pengelolaan laboratorium

BRMP Papua Barat memiliki satu unit Laboratorium, yaitu Laboratorium Pascapanen. Laboratorium BRMP Papua Barat telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 KAN sejak 4 Oktober 2019 dan berlaku hingga 3 Oktober 2024. Kemudian dilakukan re-akreditasi dan mendapat sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 KAN sejak 11 Desember 2024 berlaku hingga 3 Oktober 2029. Laboratorium BRMP Papua Barat memiliki kekhususan analisis dalam bidang pascapanen dan produk-produk olahan pangan dan hasil pertanian. Ruang lingkup analisisnya adalah pengujian kadar air, pengujian kadar abu, pengujian kadar lemak/minyak dan pengujian kadar protein serta penambahan ruang lingkup di tahun 2024 dengan pengujian komoditas biji-bijian, yaitu biji kopi, biji pala dan biji kakao untuk mendukung Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

BRMP Papua Barat. Sampai dengan Tahun 2025, terdapat 4 lingkup kegiatan utama dari Laboratorium BRMP Papua Barat yang dilakukan yaitu: layanan analisis sampel, belanja alat & bahan kimia, pembayaran iuran KAN, pencatatan suhu harian, pembuatan berita rutin dan perawatan rutin alat pengujian dalam rangka pemenuhan syarat jaminan mutu hasil pengujian. Output kegiatan dapat disajikan pada Tabel 22 berikut:

Tabel 27. Kegiatan dan Output Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Tahun 2025

Kegiatan		Output Kegiatan	Pengguna
a.	Layanan analisis sampel	- Laporan Hasil Uji (LHU) sebanyak 13 Dengan 87 sampel	15
b.	Perawatan rutin alat pengujian dalam rangka pemenuhan syarat jaminan mutu hasil pengujian	- Perawatan peralatan dan lingkungan lab secara rutin	Internal lab
c.	Pencatatan suhu harian	Mencatat rutin suhu dan kelembaban di jam 07.30, 12.00 dan 16.00	
d.	Pembayaran iuran tahunan KAN	Pembayaran iuran akreditasi laboratorium sebesar Rp1.500.000,- melalui aplikasi KANMIS	
e.	Pembuatan berita mingguan laboratorium	- Pengenalan laboratorium - SOP APB laboratorium - Pengujian proksimat sampel briket	
f.	Pengecekan alat	- Mengecek kerusakan alat Destiler Kjeldahl Kjelflex K-360 dengan teknisi PT. BUCHI Indonesia via daring bulan September 2025	

Pada tahun 2025, unit laboratorium berhasil menyelesaikan 13 layanan analisis sampel sesuai dengan permintaan pelanggan. Pelaksanaan uji mutu berjalan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, dokumentasi kegiatan laboratorium dilakukan secara berkala untuk memastikan keterlacakan data dan transparansi proses. Pengecekan terhadap alat utama juga berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan instrumen laboratorium. Secara umum, kegiatan berjalan lancar, tetapi ada beberapa kendala teknis yang muncul.

Keberhasilan

- a. Telah dilakukan pemeliharaan alat laboratorium.
- b. Telah dilakukan pengujian organoleptik pada sampel coklat ransiki dan sampel pala goyang, juga telah dilakukan analisis PUTK sampel tanah warmare.
- c. Telah dilakukan pengujian proksimat pada sampel tepung ikan.
- d. Telah dilakukan pengecekan kerusakan alat.
- e. Telah dilakukan pencatatan suhu ruangan.
- f. Telah dilakukan pembuatan video laboratorium.

Permasalahan

- a. Suhu ruangan melampaui batas keberterimaan.
- b. Pengambilan sampel tanah yang tidak sesuai prosedur dari pelanggan.
- c. Alat Destiler Kjeldahl Kjelflex K-360 mengalami kerusakan.

Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu kegiatan laboratorium, tindak lanjut yang dapat diterapkan untuk permasalahan di atas yaitu:

- a. Menyalakan pendingin ruangan agar kembali dalam batas keberterimaan.
- b. Menyampaikan prosedur pengambilan sampel tanah yang tepat kepada pelanggan.
- c. Dilakukan pengecekan dan juga memvalidasi bagian kerusakan oleh teknisi PT. BUCHI Indonesia via daring.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu kegiatan laboratorium, tindak lanjut yang dapat diterapkan untuk permasalahan di atas yaitu diusulkan pembiayaan untuk rehabilitasi peralatan dan dilakukan peremajaan gedung laboratorium.

3.2.5. Pengelolaan Kebun Percobaan BRMP Papua Barat.

Pengelolaan Kebun Percobaan mengacu pada fungsi kebun percobaan yaitu sebagai lokasi 1) Kebun koleksi sumber daya genetik pertanian, (2) penghasil sumber benih, (3) diseminasi/*show Windows* teknologi, (4) kebun produksi, (5) agrowisata, (6) uji multi lokasi galur harapan, dan (7) bimbingan teknis inovasi pertanian. Dari ketujuh fungsi tersebut, hanya 2 fungsi yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu 1) lokasi display (*show Windows* teknologi), dan 2) kebun produksi untuk penghasil PNBP.

Tabel 28. Nama Kebun Percobaan dan Agro Ekosistem BRPM Papua Barat.

No.	Nama KP	Luas KP (m ²)	Agroekosistem		
			Lahan Tadah Hujan	Lahan Kering	Embung
1	Anday	200.000		163.500	1000
2	Manokwari	13.000		12.310	
3	Sorong	12.000	5.000	5.740	
		225.000	5.000	181.550	1.000

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa agrosistem Kebun Percobaan BRMP papua barat yang berada di 3 lokasi: 1) KP Anday agrosistem lahan kering, 2) KP Manokwari agrosistem lahan kering, dan 3) KP Sorong agrosistem lahan tadah hujan.

Tabel 29. Matrik Pengelolaan KP Anday Tahun 2025

Pemanfaatan untuk gedung dan bangunan lainnya		Pemanfaatan untuk fungsi KP	
Jenis bangunan	Luas (ha)	Pemanfaatan Lahan KP	Luas (ha)
➤ 1 gedung kantor	0,01	A. Lahan Bagian Depan	2,55
➤ 1 gedung lab	0,02	➤ Display Jeruk	0,68
➤ 17 rumah dinas tipe 50	0,09	➤ Kebun Produksi (Jagung, Cabe, Sayuran, dll)	1,71
➤ 4 rumah dinas tipe 36	0,01	➤ Kebun Produksi buah-buahan	0,16
➤ 1 Guest house	0,01	B. Lahan Bagian Belakang	13,80
➤ 1 gudang benih	0,01	➤ Display jeruk	1,00
➤ 1 Rumah kasa	0,01	➤ Kebun produksi blng kompleks yg termanfaatkan (disewa)	5,77
➤ 1 Rumah kasa	0,01	➤ Kebun produksi belakang komplek rumah dinas yang belum termanfaatkan	7,03
➤ 1 Kandang ayam	0,01		
➤ 1 gudang alsintan	0,01		
➤ 1 gedung kantor baru	0,05		
➤ Jalan, saluran, halaman, pagar	3,31		
➤ Kolam/embung	0,10		
TOTAL	3,65		16,35

Tabel 30. Kegiatan Kebun Percobaan, Komoditas dan Indikator Output.

Uraian Kegiatan		Luas (Ha)	Komoditas	Indikator Output
1.	Lokasi Display/ <i>show Windows</i>	1,68	Jeruk	untuk tanaman menghasilkan, rata-rata hasil 25 kg per pohon per musim.
2.	Kebun Produksi Tanaman pangan dan hortikultura	1,71	Pergiliran tanaman Jagung manis, cabe keriting, dan semangka	1. Rata-rata hasil jagung manis = 4 ton/ha dengan berat rata-rata 0,25 kg per tongkol. 2. Rata-rata hasil cabe keriting = 3,46 ton per ha (BPS Papua Barat, 2020). 3. Rata-rata hasil semangka = 4,52 ton/ha (BPS Papua Barat, 2020).
3.	Kebun produksi buah-buahan	0,16	Jambu kristal, mangga, dan pisang	Pada tanaman rata-rata menghasilkan 10 kg per pohon setiap musim-
4.	Kebun Produksi yang Disewakan	5,77	Komoditas sayuran	-
5.	Lahan yang belum dimanfaatkan	7,03	Sewa lahan atau bagi hasil	-
Jumlah		16,35		

3.2.6. Pelayanan Publik

Pada Tahun 2025, pengelolaan informasi publik di lingkungan BRMP Papua Barat menunjukkan kinerja yang semakin optimal dan terstruktur. Sepanjang tahun tersebut, tercatat sebanyak 124 permohonan layanan informasi publik yang dilayani oleh PPID. Permohonan tersebut berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan mencakup beberapa kategori informasi, antara lain informasi agribisnis, informasi manajemen, serta informasi pengadaan barang dan jasa. Seluruh permohonan informasi ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta pelayanan yang cepat dan tepat. Sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, BRMP Papua Barat juga melaksanakan beberapa kegiatan survei, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sekaligus

memperoleh gambaran persepsi publik terhadap kualitas pelayanan serta integritas penyelenggaraan layanan informasi publik.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, diperoleh jumlah responden sebanyak 92 orang. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 95,62 yang termasuk dalam kategori Baik. Capaian ini mencerminkan bahwa masyarakat pada umumnya merasa puas terhadap layanan informasi publik yang diberikan, baik dari aspek prosedur, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, maupun sikap petugas dalam memberikan layanan. Selain itu, hasil Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) tercatat sebesar 3,65 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah dinilai baik oleh masyarakat. Sementara itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) memperoleh nilai 3,79 yang mengindikasikan adanya kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di BRMP Papua Barat (Lampiran 14).

Dalam aspek pelaporan, Laporan Layanan PPID secara rutin disampaikan kepada Sekretariat BRMP dan PPID Utama setiap bulan. Penyampaian laporan dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya melalui media surat elektronik sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan untuk memastikan tersedianya data layanan yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain layanan langsung, upaya diseminasi atau penderasan informasi publik juga dilakukan melalui berbagai kanal media sosial resmi. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari PPID Utama, yaitu dengan memastikan minimal jumlah postingan setiap bulan terpenuhi. Informasi yang disampaikan melalui media sosial meliputi kegiatan, layanan, kebijakan, serta informasi strategis lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Rekapitulasi kegiatan penderasan informasi tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 31 berikut:

Tabel 31. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik BRMP Papua Barat.

No	Bulan	Penyampaian Laporan Bulanan 2025	Jumlah Permohonan Layanan	Jumlah Konten Instagram	Jumlah Konten Facebook	Jumlah Konten Youtube
1	Januari	6 Februari	10	13	13	2
2	Februari	4 Maret	11	11	11	2
3	Maret	3 April	10	14	10	3
4	April	7 Mei	14	10	10	3
5	Mei	6 Juni	20	20	20	2
6	Juni	10 Juli	10	41	46	2
7	Juli	6 Agustus	9	43	43	2

No	Bulan	Penyampaian Laporan Bulanan 2025	Jumlah Permohonan Layanan	Jumlah Konten Instagram	Jumlah Konten Facebook	Jumlah Konten Youtube
8	Agustus	4 September	8	55	60	2
9	September	3 September	9	44	37	2
10	Oktober	10 November	10	61	61	2
11	November	9 Desember	9	61	60	2
12	Desember	6 Januari 2026	4	38	37	2
Jumlah			124	441	408	26

3.2.7. Kegiatan Kerjasama

BRMP Papua Barat selama Tahun 2025 selain melakukan tugas kegiatan yang terkait langsung dengan target kinerja yang telah ditetapkan, juga melaksanakan kegiatan kerjasama sebagaimana disajikan pada Tabel 27 berikut:

Tabel 32. Kegiatan Kerjasama BRMP Papua Barat Tahun 2025

No	No. MoU	Judul Kerjasama	Nama Mitra Kerjasama	Durasi Kerjasama
1.	525/830/TPH-BUNPB/05/2024 B-161/HM.210/H.12.31/05/2024 Tanggal 24 Mei 2022	Produksi Benih dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggulan Daerah Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	3 Tahun (2022 - 2025)
2.	- Nomor Pihak Pertama : 475.25/LTR/GOKPL/HY - Nomor Pihak Kedua : 4183/HM.200/H.12/11/2025	Pengembangan wilayah pertanian di daerah terdampak dari Kegiatan Migas	GENTING OIL KASURI PTE. LTD, Kab. Teluk Bintuni.	2 tahun, 2 bulan (11-11-2025 sd 31-12- 2027)
3	Nomor: B-374.5/HK.210/H.12.31/10/2025 No: 424.1/SMK S. Kel-105/V/2025 Tanggal: 28-05- 2025	Kerja Sama Program Praktek Kerja Lapangan di BRMP Papua Barat.	SMK NEGERI 1 YEMBUN, TAMBRAUW	7 Bulan (16-05-2025 sd 31-12-2025)

Pada Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) kerja sama, yaitu 1) kerjasama Produksi Benih dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggulan Daerah Papua Barat dengan Dinas TPHBUN Provinsi Papua Barat (2022–2025) dan 2) Pengembangan wilayah pertanian di daerah terdampak dari Kegiatan Migas dengan GENTING OIL KASURI PTE. LTD, Kab. Teluk Bintuni dan 3) Kerja Sama Program Praktek Kerja Lapangan di BRMP Papua Barat dengan SMK NEGERI 1 YEMBUN, Kabupaten Tambrauw.

3.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

3.3.1. Keberhasilan

Dari pemaparan kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja BRMP Papua Barat tahun 2025 secara umum berhasil dengan baik. Indikator kinerja Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan capaian sesuai target (100%). Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya dengan capaian kinerja >100% yaitu 1) indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, dan 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

3.3.2. Kendala

Permasalahan umum yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BRMP Papua Barat adalah tidak tersedianya anggaran sehingga menyebabkan perubahan dokumen perencanaan. Beberapa upaya tindak lanjut permasalahan yaitu koordinasi intensif dengan BBPPMP dan BRMP.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) kegiatan tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. (2) masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam penerapan modernisasi pertanian yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan secara maksimal.

Kendala internal yang terjadi disebabkan oleh: (1) Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teknis diblokir dari pagu awal, dan sampai Triwulan IV tahun 2025 baru dibuka blokir. Hal ini menyebabkan kegiatan teknis di lapangan terlambat dilaksanakan.

Langkah Antisipasi

Seiring dengan tantangan kebutuhan standar pertanian oleh pengguna dan dinamika perubahan lingkungan strategis, BRMP Papua Barat sebagai unit fungsional di daerah, akan terus melaksanakan kegiatan Penerapan standar instrumen pertaniandan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan para stakeholder di Papua Barat. Demikian juga diseminasi dan penerapan modernisasi pertanian menjadi salah satu tugas BRMP Papua Barat yang akan terus diemban untuk tercapainya akselerasi penyampaian informasi standar kepada pengguna dan meningkatkan tingkat adopsinya, menjawab isu sentral lambannya diseminasi modernisasi pertanian, lebih khusus pada petani lokal di Papua Barat. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan BRMP Papua Barat antara lain: (1) BRMP Papua Barat harus mampu menterjemahkan semua petunjuk teknis bagi kegiatan-kegiatan strategis kementerian pertanian dan kegiatan Badan Perakitan dan Modernisasi

Pertanian dengan kondisi spesifik lokal di Papua Barat, (2) BRMP Papua Barat harus dapat melakukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya di daerah, dan (3) BRMP Papua Barat fokus pada kegiatan-kegiatan strategis nasional dan kegiatan-kegiatan unggulan di Papua Barat.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

3.4.1. Realisasi Keuangan

Dukungan dana bagi pelaksanaan tupoksi BRMP Papua Barat terutama berasal dari dana APBN yang tertuang dalam DIPa BRMP Papua Barat Tahun 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp 5.904.021.000,- dengan pagu efektif Rp. 5.492.698.000,- (tidak blokir). Jumlah anggaran yang berhasil terealisasi di Tahun 2025 sebesar Rp. 5.494.465.754 atau 99,87%. Rincian pagu dan realisasi anggaran per kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 33. Pagu Anggaran Kegiatan Utama dan Tingkat Penggunaan Dana Tahun 2025

No.	Kegiatan Utama	Pagu (Rp.)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	64.238.000	64.238.000	63.770.230	99,27
2	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan	1.175.000.000	809.576.000	808.716.421	99,89
3	Layanan BMN	10.000.000	10.000.000	9.991.692	99,96
4	Layanan Hubungan Masyarakat dan informasi	6.700.000	6.700.000	6.697.000	99,96
5	Layanan Umum	139.671.000	139.671.000	139.258.570	99,70
6	Layanan Perkantoran	4.468.783.000	4.468.783.000	4.463,302,342	99,88
7	Layanan pemantauan dan Evaluasi	2.730.000	2.730.000	2,729,499	99,98
Total		5.904.021.000	5.501.698.000	5.494.465.754	99,87

Pada tabel di atas penggunaan dana menunjukkan dari anggaran pagu efektif Rp. 5.501.698.000 terealisasi Rp. 5.494.465.754 atau 99,87% di Tahun 2025.

3.4.2. Pengelolaan PNBP

a. Target PNBP

Sumber penerimaan PNBP BRMP Papua Barat tahun 2025 terdiri dari PNBP fungsional dan PNBP Umum. PNBP fungsional bersumber dari :

- a) Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya.

BRMP Papua Barat memiliki kebun percobaan (KP) ekosistem lahan kering dataran rendah yang dikelola sebagai kebun produksi dan display. Sebagai kebun produksi, KP ditanami dengan komoditas hortikultura yang memiliki pasaran di daerah setempat seperti jagung manis, semangka, cabe keriting, cabe rawit, dan jenis sayuran lainnya. Sedangkan sebagai kebun display, KP ditanami dengan jeruk siam dan keprok. Selain itu, pada tahun 2025 terdapat penerimaan yang bersumber dari produksi benih sumber padi.

- b) Penerimaan yang bersumber dari layanan jasa pengujian dan analisis serta sertifikasi.

BRMP Papua Barat juga memiliki laboratorium terakreditasi yang memberikan layanan bidang pascapanen. Walaupun pada 3 tahun terakhir, pengguna jasa layanan untuk laboratorium masih rendah.

- c) Penerimaan yang bersumber dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi.

Jenis PNBP ini bersumber dari sewa rumah dinas.

Target PNBP Tahun 2025 semula sebesar Rp 51.025.000,-. Namun, pada bulan September dilakukan revisi penyesuaian target berdasarkan realisasi penerimaan bulan Agustus sehingga target PNBP Tahun 2025 BRMP Papua Barat menjadi Rp 118.000.000,- (Tabel 34).

Tabel 34. Target PNBP BRMP Papua Barat tahun 2025

No.	Kode Akun	Uraian	Target Semula	Target Menjadi
1.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	30.000.000,-	30.000.000,-
2.	425289	Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	1.025.000,-	2.000.000,-
3.	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	20.000.000,-	86.000.000,-
4.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,-	0,-

b. Realisasi penerimaan PNBP

Penerimaan PNBP tahun 2025 terdiri atas PNBP umum dan PNBP fungsional. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp. 424.960.700,-.

Tabel 35. Realisasi penerimaan PNBP BRMP Papua Barat tahun 2025 Berdasarkan Akun Penerimaan

Kode Akun	Uraian	Jumlah
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	29.583.200,-
425289	Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	9.762.000,-
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	385.245.000,-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370.000,-
TOTAL		424.960.700,-

Realisasi Pendapatan untuk tahun 2025 adalah sebesar 424.960.700,- atau mencapai 360,14% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 118.000.000,-. Pendapatan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat terdiri dari: a) Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (cabai keriting, jagung manis, semangka, jeruk manis dan benih padi); b) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berupa sewa rumah dinas; c) Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya; d) Sewa Lahan Kering Dataran Rendah; d) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 36. Informasi capaian Target, Realisasi Penerimaan, dan Realisasi Pagu Penggunaan PNBP sampai dengan Desember Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan (Umum)	Realisasi Penerimaan (Fungsional)	Pagu Penggunaan	Realisasi Pagu Penggunaan
2025	118.000.000	370.000	424.590.700	64.238.000	99,28

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pagu penggunaan PNBP Tahun 2025 sebesar 99,28 %.

3.4.3. Hibah Langsung Luar Negeri

BRMP Papua Barat dalam Tahun Anggaran 2025 hanya mengelola dana APBN dan tidak mendapat alokasi dana hibah langsung dari luar negeri. Alokasi dana bantuan yang pernah dikelola BRMP Papua Barat adalah dana proyek SMARTD Tahun 2012 hingga Tahun 2017 yang digunakan untuk infastruktur Kebun Percobaan Anday dan Lab Pascapanen BRMP Papua Barat.

BAB IV PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja BRMP Papua Barat Tahun 2025 telah dicapai dengan baik. Capaian kinerja yang dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan capaian 100 % (Berhasil).
2. Sasaran 2: 1) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif, dan 2) jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi, tidak dilaksanakan karena tidak terdapat dukungan anggaran pada tahun berjalan.
3. Sasaran 3: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern, tidak dilaksanakan karena tidak terdapat dukungan anggaran pada tahun berjalan
4. Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan capaian realisasi 85,64 Nilai atau 100,57 % (Sangat Berhasil)
5. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian realisasi 91,78 Nilai atau 100.33 % (Sangat Berhasil).

Sedangkan ringkasan capaian kinerja BRMP Papua Barat berdasarkan Rincian Output (RO) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 37. Ringkasan Capaian Kinerja BRMP Papua Barat pada Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama				
No.	Berdasarkan Rincian Output (RO)	Target	Realisasi	%
1	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00
2.	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00
3	Layanan BMN	1 layanan	1 layanan	100.00
4	Layanan Hubungan Masyarakat dan informasi	1 Layanan	1 Layanan	100.00
5	Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	100.00
6	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100.00
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator kinerja BRMP Papua Barat tahun 2025 berdasarkan kategori Rincian Output (RO), dan tercapai sesuai target (100%). Sedangkan kinerja lainnya yang dicapai BRMP Papua Barat Tahun 2025 adalah (1) mewujudkan tiga kerjasama yang dapat direalisasikan 100%, (3) Satker Lingkup BRMP Penerapan Terbaik I Atas Kinerja Perbenihan Padi Tahun 2024, (4) mendapat Peringkat dalam Kategori Informatif, Inovasi Pelayanan Publik UK/UPT lingkup eselon III pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025.

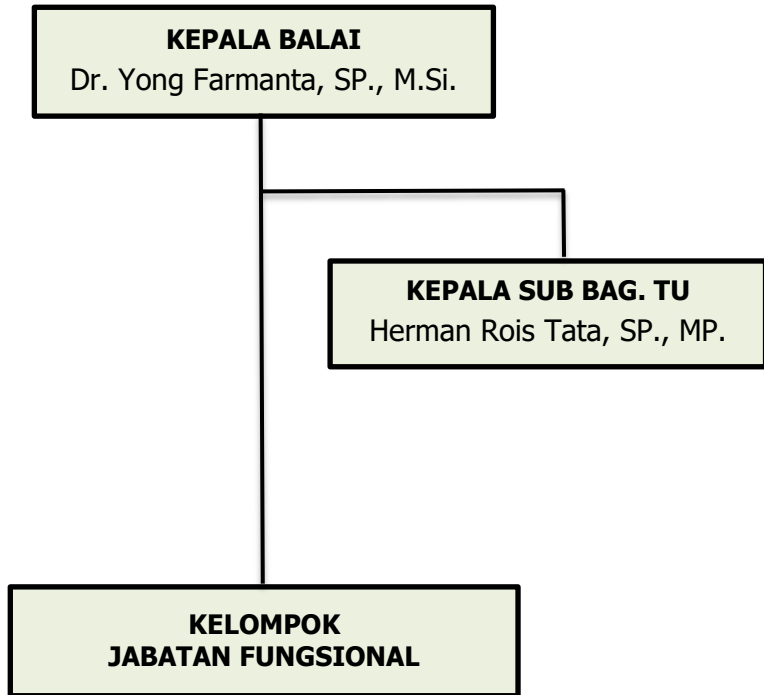
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja BRMP Papua Barat ke depan masih diperlukan, langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, berupa:

1. Penambahan jumlah SDM melalui koordinasi dengan BRMP.
2. Peningkatan kompetensi SDM LSPro dan laboratorium BRMP Papua Barat.
3. BRMP Papua Barat harus mampu menterjemahkan semua petunjuk teknis bagi kegiatan-kegiatan strategis kementerian pertanian dan kegiatan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan kondisi spesifik lokal di Papua Barat.
4. BRMP Papua Barat harus dapat melakukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya di daerah.
5. BRMP Papua Barat fokus pada kegiatan-kegiatan strategis nasional dan kegiatan-kegiatan unggulan di Papua Barat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BRMP Papua Barat Tahun 2025



Lampiran 2. Jumlah ASN BRMP Papua Barat Berdasarkan Golongan Tahun
2020-2025

Golongan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Golongan (Orang)					
I	0	0	0	0	0
II	3	2	2	2	2
III	30	21	19	18	22
IV	2	1	1	1	2
PPPK	0	0	1	1	8
PPPK Paruh Waktu	0	0	0	0	8
Jumlah	35	24	23	22	42
Golongan (%)					
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	8,57	8,33	8,69	9,09	4,76
III	85,71	87,50	82,61	81,81	52,38
IV	5,71	4,17	4,35	4,54	4,76
PPPK	0	0	4,35	4,54	19,05
PPPK Paruh Waktu	0	0	0	0	19,05
Jumlah	100	100	100	100	100

Lampiran 3. Perkembangan ASN BRMP Papua Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2025

Pendidikan terakhir	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
SLTA	2	2	2	1	14
D3	3	2	2	1	2
D4	0	0	0	0	0
S1	18	14	13	12	18
S2	11	5	5	7	7
S3	1	1	1	1	1
Jumlah	35	24	23	22	42

Lampiran 4. Komposisi ASN BRMP Papua Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala BBRMP (Eselon IVb)	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha (Eselon IIIc)	1
3	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	2
4	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	4
5	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	2
6	Calon Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	2
8	Pustakawan Ahli Pertama	1
9	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	9
11	Pengolah Data dan Informasi	1
12	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	1
13	Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
14	Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	1
15	Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
16	Administrasi Perkantoran	5
17	Operator Layanan Operasional	8
	JUMLAH	42

Lampiran 5. Perkembangan Jabatan Fungsional BRMP Papua Barat Tahun 2025

Nama Jabatan Fungsional	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bidang Pertanian					
Peneliti Ahli Utama	0	0	0	0	0
Peneliti Ahli Madya	1	0	0	0	0
Peneliti Ahli Muda	3	0	0	0	0
Peneliti Ahli Pertama	7	0	0	0	0
Calon Peneliti	0	0	0	0	0
Penyuluh Ahli Utama	0	0	0	0	0
Penyuluh Ahli Madya	0	0	0	0	0
Penyuluh Ahli Muda	1	1	1	2	2
Penyuluh Ahli Pertama	5	4	5	4	4
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	0	1	1	1	2
Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	0	2	1	1	2
Calon Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	0	0	0	0	1
Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Non Bidang Pertanian					
Pustakawan Ahli Pertama	0	0	0	1	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	1	1	1
Jumlah	17	11	9	10	18

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja (PK) Awal (BSIP Papua Barat) Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**
KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRYKHA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 83315
TELEPON/FAX/SMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.balai.pertanian.go.id E-MAIL : balai.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aser Rouw
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua: Pihak Pertama


Fadry Djufry


Aser Rouw

Lampiran 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja (PK Awal) BSIP Papua Barat Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)	85

No,	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	18.524.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	18.524.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	-
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.351.583.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4.351.583.000

Kapala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

 Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

 Asen RDUW

Lampiran 8. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi I BRMP Papua Barat Tahun 2025

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TIKOKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON (0986) 2213347 WEBSITE: papuabarat.bmp.pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama : Yong Farmanta Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  Fadry Djufry	Jakarta, 28 Mei 2025 Pihak Pertama  Yong Farmanta

Lampiran 9. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Revisi I Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 18.524.000,-
1	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp 18.524.000,-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 0,-
2	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 0,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp 5.451.583.000,-
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 5.451.583.000,-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian	Jumlah Usahatani yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan Standar Pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan yang Adaptif	Jumlah Produksi Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)	85

Lampiran 10. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi II BRMP Papua Barat Tahun 2025

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TERKORA ANDAY, MANDOWARI, PAPUA BARAT 80315 TELEPON: (0966) 2215347 WEBSITE: papuabarai.brmp.pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama : Yong Farmanta Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadjry Djufry Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, Desember 2025 Pihak Pertama  Yong Farmanta
Fadjry Djufry	

Lampiran 11. Sasaran dan Indikator Kinerja PK Revisi II Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	0	Teknologi
		Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	0	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)	0	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBSM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Papua Barat (Nilai)	85.15	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Papua Barat (Nilai)	91.48	Nilai

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 64.238.000,-
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp 64.238.000,-
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 0,-
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 0,-
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 5.848.783.000,-
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 5.848.783.000,-
		Rp 5.913.021.000,-

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI PAPUA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	Lembaga
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta

	☐ Non-Cascading								
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan								
Sumber Data	BRMP Penerapan								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar</td><td>Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.</td></tr> <tr> <td>Penerapan standar tidak konsisten</td><td>Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang		
Potensi Risiko	Mitigasi								
rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.								
Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang								
Catatan									

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan Mendapatkan mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	Teknologi
Target	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan										
Sumber Data	BRMP Penerapan										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td><td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.		
Potensi Risiko	Mitigasi										
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.										
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.										
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.										
Catatan											

3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan
	Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya,
Satuan	Unit
Target	2025: 0 2026: 24 2027: 24 2028: 24 2029: 24
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan								
Sumber Data	BRMP Penerapan								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td><td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td></tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td><td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td></tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td><td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Potensi Risiko	Mitigasi								
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya								
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.								
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.								
Catatan	Produksi Benih Sumber mencakup benih sumber yang telah tersertifikasi serta calon benih sumber yang masih dalam proses produksi dan belum memperoleh sertifikasi, yang perhitungannya dimaksudkan untuk mencerminkan kapasitas produksi benih sumber pada periode berjalan.								

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (orang)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Orang
Target	2025: 0 2026: 175 2027: 350 2028: 525 2029: 700
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan								
Sumber Data	BRMP Penerapan								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td><td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.
Potensi Risiko	Mitigasi								
Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.								
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.								
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.								
Catatan	▪ teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern yang diterapkan bisa salah satu atau kombinasi antara teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modernisasi ▪ Teknologi digital dapat berupa aplikasi SIAP TANAM, aplikasi digital pertanian lainnya, dll ▪ <i>Smart farming</i> dapat berupa penggunaan varietas unggul bersertifikat, pupuk dan pestisida tepat dosis, waktu dan cara, penggunaan air yang efektif, serta pertanian presisi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan (penggunaan sensor dan IoT, sistem monitoring digital, sistem otomasi) ▪ <i>Modern farming</i> adalah pemanfaatan mekanisasi dalam proses pertanian seperti penggunaan traktor, drone, alat tanam dan lainnya yang efektif dan efisien.								

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Formula Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BRMP Tujuan Mewujudkan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 85,15 2026: 85,64 2027: 86,00 2028: 86,00 2029: 86,00
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada

Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)											
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan											
Sumber Data	BRMP Penerapan											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td> <td>Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td> <td>updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td> <td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
Potensi Risiko	Mitigasi											
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.											
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.											
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.											
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata											
Catatan												

6. Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (Nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Pspua Barat yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA.. Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat secara otomatis akan dihitung dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja.
Satuan	Nilai
Target	2025: 91,48 2026: 91,48 2027: 91,48 2028: 91,48 2029: 91,48
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya

Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan											
Sumber Data	BRMP Penerapan											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td> <td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.</td> </tr> <tr> <td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td> <td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td> </tr> <tr> <td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td> <td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td> </tr> <tr> <td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td> <td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Potensi Risiko	Mitigasi											
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.											
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.											
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan											
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan											
Catatan												

Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non-Peta ☐ Non-Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan											
Sumber Data	BRMP Penerapan											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td> <td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.</td> </tr> <tr> <td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td> <td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td> </tr> <tr> <td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td> <td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td> </tr> <tr> <td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td> <td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Potensi Risiko	Mitigasi											
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.											
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.											
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan											
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan											
Catatan												

Lampiran 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Papua Barat Tahun 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	065	018	450871	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT	Nilai	100.00	82.61	98.38	50.00	100.00	97.17	100.00	91.78	100%	0.00	91.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.39	19.68	5.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	91.31		86.39				100.00				

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 09-01-26 06:42:35 oleh : 450871

Lampiran 14. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyara tan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Seluruh Jenis Layanan	92	95,4	95,95	95,95	86,85	94,4	95,23	95,95	97,03	93,88	95,62
Rerata IKM Per Unsur			95,4	95,95	95,95	86,85	94,4	95,23	95,95	97,03	93,88	95,62
IKM Unit Layanan			95,62									
Mutu Unit Layanan			A									

Lampiran 15. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BRMP Papua Barat



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANDOKWARI, PAPUA BARAT 80115
TELEPON (0906) 2213347
WEBSITE : papuabarat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
NOMOR : B- 390/KPTS/PW.170/H.12.31/06/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

KEPALA BRMP PAPUA BARAT



YONG FARMANTAWA

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
4. Kepala Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I

Nomor : B- 390/KPTS/PW.030/H.12.31/06/2025

Tanggal : 10 Juni 2025

Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Yong Farmanta,S.P.,M.Si. NIP. 19790116 200312 1 002	Kepala Balai	Pengarah
2.	Herman Rois Tata,S.P., M.P. NIP. 19760827 200812 1 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Muhammad Arif Arbianto,S.P. NIP.19840519 201101 1 008	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Sekretaris
4.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP. 19780519 201101 1 003	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 10 Juni 2025

KEPALA BRMP PAPUA BARAT



YONG FARMANTA

Lampiran 16. Keputusan Menteri Hukum RI Pendirian Koperasi Pemasaran
AMIN (Anak Muda Inspiratif Negeri)


KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0084990.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PEMASARAN ANAK MILENIAL INSPIRATIF NEGERI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan SUYANTO S.H., M.Kn., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 155 Tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat oleh SUYANTO S.H., M.Kn., M.H., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PEMASARAN ANAK MILENIAL INSPIRATIF NEGERI tanggal 31 Juli 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PEMASARAN ANAK MILENIAL INSPIRATIF NEGERI.

MEMUTUSKAN :

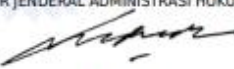
Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PEMASARAN ANAK MILENIAL INSPIRATIF NEGERI - yang berkedudukan di KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 155 Tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat oleh SUYANTO S.H., M.Kn., M.H., yang berkedudukan di KABUPATEN MANOKWARI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 31 Juli 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI

Lampiran 17. SOP Pasca Panen Kopi





Lampiran 19. Asset BRMP Papua Barat Tahun 2025

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 21/04/25 8:44 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kei_satker_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah	-	200,000	53,125,000,000	0	0	0	0	200,000	53,125,000,000
20102	TANAH NON PERSIL	-	200,000	53,125,000,000	0	0	0	0	200,000	53,125,000,000
132111	Peralatan dan Mesin	-	143	6,366,038,776	4	59,300,000	1	200,000,000	146	6,225,338,776
30103	ALAT BANTU	-	3	787,753,138	0	0	0	0	3	787,753,138
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	12	1,065,095,938	0	0	1	200,000,000	11	865,095,938
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	-	1	188,238,000	0	0	0	0	1	188,238,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	19	641,609,800	0	0	0	0	19	641,609,800
30501	ALAT KANTOR	-	6	288,153,155	0	0	0	0	6	288,153,155
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	46	257,941,544	0	0	0	0	46	257,941,544
30601	ALAT STUDIO	-	1	2,000,800	0	0	0	0	1	2,000,800
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	216,358,000	0	0	0	0	1	216,358,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	42,864,000	0	0	0	0	2	42,864,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	28	2,268,346,400	0	0	0	0	28	2,268,346,400
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1	304,323,000	0	0	0	0	1	304,323,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	45,495,000	0	0	0	0	2	45,495,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	8	130,900,000	4	59,300,000	0	0	12	190,200,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	12	71,960,000	0	0	0	0	12	71,960,000
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	1	55,000,000	0	0	0	0	1	55,000,000
133111	Gedung dan Bangunan	-	46	32,746,464,836	1	179,970,000	0	0	46	32,926,434,836
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	13	26,513,331,462	0	0	0	0	13	26,513,331,462
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	30	10,667,024,354	0	0	0	0	30	10,667,024,354
40401	TUGUT/ANDA BATAS	-	2	1,566,109,020	1	179,970,000	0	0	3	1,746,079,020
134111	Jalan dan Jembatan	-	824	108,238,000	0	0	0	0	824	108,238,000
50101	JALAN	-	824	108,238,000	0	0	0	0	824	108,238,000
134112	Irigasi	-	3	136,000,000	0	0	0	0	3	136,000,000
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	1	13,000,000	0	0	0	0	1	13,000,000
50206	BANGUNAN AIR BERSHAIR BAKU	-	2	123,000,000	0	0	0	0	2	123,000,000
134113	Jaringan	-	6	385,028,110	0	0	0	0	6	385,028,110
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	3	122,528,110	0	0	0	0	3	122,528,110
50401	JARINGAN AIR MINUM	-	2	168,800,000	0	0	0	0	2	168,800,000
50402	JARINGAN LISTRIK	-	1	93,700,000	0	0	0	0	1	93,700,000
135121	Aset Tetap Lainnya	-	4	480,000	0	0	0	0	4	480,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	4	480,000	0	0	0	0	4	480,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	16	174,836,104	1	200,000,000	5	259,300,000	12	115,536,104
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	6	31,825,000	0	0	0	0	6	31,825,000

Kode Lap : lap_bmn_gab_kei_satker_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31001	KOMPUTER UNIT	-	10	143,011,104	0	0	0	0	10	143,011,104
TOTAL				93,042,085,825		439,370,000		459,300,000		93,022,085,825

MANOKWARI, 21 April 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Asar Rouse, SP, M. Si
197203161996031002

Lampiran 20. Penghargaan atas kontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan Tahun 2025



Lampiran 21. UK/UPT lingkup eselon III Kategori Informatif.



